

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah dalam Sri dan Haris, 2003). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB dalam Sri dan Haris, 2003) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia termasuk Indonesia, adalah: (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of commissioners*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep *good corporate governance* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

*Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* (BRT dalam Sri dan Haris, 2003). Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley *et al.*, dalam Sri dan Haris, 2003).

Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walaupun banyak perusahaan yang menyadari pentingnya prinsip *good corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003).

Penelitian mengenai *corporate governance* di Indonesia telah beberapa kali

penerapan prinsip *corporate governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan manipulasi laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini mengindikasikan belum berhasilnya penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Mayangsari dan Murtanto dalam Sri dan Meniek (2003) menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (*audit committee*), komponen penting dalam *corporate governance* di Indonesia, direspon oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. Gunarsih dan Hartadi dalam Tri Gunarsih dan Yusitha (2003) meneliti pengaruh pengumuman pengangkatan Komisaris Independen terhadap *return* saham di Bursa Efek Jakarta. Sebagaimana aturan dari BEJ, Nomor Kep-315/BEJ/062000 selain komisaris independen, perusahaan publik juga perlu membentuk komite audit.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Tri Gunarsih dan Yusitha (2003) menguji reaksi pasar terhadap pengumuman pembentukan komite audit di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembentukan komite audit direaksi oleh investor dan terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* pada sebelum dan sesudah pengumuman pembentukan komite audit.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini ingin menguji

**“HUBUNGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA.”**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dilihat dari rasio-rasio, yaitu Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas.
2. Penerapan *good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit.

## **C. Perumusan Masalah Penelitian**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan *good corporate governance*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta.
2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pustaka